



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Sofjanhadi Mashudi

Jabatan : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2026

Pihak Kedua,
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,
Inspektur

Mirza Sofjanhadi Mashudi

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	1.1	Tingkat Maturitas SPIP	3.58
		1.2	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	76%
		1.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5
		1.4	Opini BPK	WTP
		1.5	Survei Penilaian Integritas (SPI)	82
		1.6	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)	4
		1.7	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	2.00
2.	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang <i>Agile</i>	2.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	82%
		2.2	Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	81%
3.	Terwujudnya Transformasi APIP sebagai <i>Strategic Partner</i> dan <i>Trusted Advisor</i>	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	3 dari 4
		3.2	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	90%
4.	Terwujudnya Tata Kelola APIP yang Baik	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	92%

Program : Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Pengawasan Inspektorat

Total

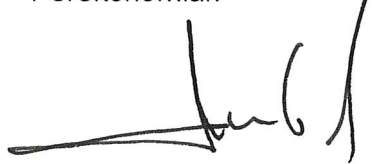
(Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu/Rupiah)

Anggaran

Rp 767.184.000

Rp 767.184.000

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Inspektur



Mirza Sofjanhadi Mashudi

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Tingkat Maturitas SPIP	3.58	Pelaksanaan Reviu, Evaluasi dan Pemantauan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko 2. Pendampingan Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 3. Pendampingan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 4. Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Manajemen Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 2. Pengisian Kertas Kerja (KK) Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 3. Penetapan Peraturan terkait Manajemen Risiko 4. Reviu Formulir Manajemen Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 2. Permintaan Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP tahun 2026 3. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	76%	Koordinasi dengan unit kerja terkait rekomendasi BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester II Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester I Tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja

		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,5	Pendampingan Pembangunan ZI kepada Unit Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Kepmenko tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2. Pendampingan Pembangunan ZI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pembangunan ZI di lingkungan Unit Kerja yang dibangun 2. Pelaksanaan Survei Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 3. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) 4. Pendampingan Pembangunan ZI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional (TPN) 2. Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK oleh TPN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait Hasil Evaluasi ZI menuju WBK oleh TPN 2. Penyusunan Draft Matriks Tindak Lanjut hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK oleh TPN
		Opini BPK	WTP	Pengawasan terkait anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2025 2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 3. Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK 4. Reviu Implementasi P3DN Tahun Anggaran 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Revisi/ Tambahan Anggaran Kemenko 2. Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Semester I TA 2026 3. Expose atas Audit Ketaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Semester I TA 2026 2. Reviu RKA-K/L Kemenko TA 2027 3. Reviu RKBMN TA 2028 4. Reviu Implementasi P3DN Tahun Anggaran 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Semester II TA 2026 2. Sosialisasi Praktik Baik

				5. Pelaksanaan Audit Ketaatan 6. Reviu Revisi/ Tambah Anggaran Kemenko				
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	Evaluasi Hasil SPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester II Tahun 2025 2. Finalisasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. <i>Public Campaign</i> Gratifikasi, Konflik Kepentingan, serta Budaya Anti Korupsi 4. Update Pemantauan Progres Stranas PK B15 di Aplikasi JAGA 5. Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 2. Penetapan PIC SPI Tahun 2026 3. Penyusunan dan penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2025 4. Permintaan dan penyampaian data responden SPI Tahun 2026 5. Survei Kepuasan Pengaduan Pelayanan Publik 6. <i>Update</i> Pemantauan Progres Stranas PK B18 di Aplikasi JAGA 7. Fasilitasi E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi KPK 8. Penetapan Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2025 2. Pemantauan Pengisian Survei Oleh Responden 3. Update Pemantauan Progres Stranas PK B21 di Aplikasi JAGA 4. Survei Kepuasan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester I Tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi SPI selama tahun 2026 2. Survei Kepuasan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi 4. Update Pemantauan Progres Stranas PK B24 di Aplikasi JAGA 5. Penetapan Peraturan terkait Pengelolaan Konflik Kepentingan

		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPORI)	4	Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPORI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPORI 2. Pemutakhiran Tim Pengelolaan SP4N-LAPORI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Tim Pengelolaan SP4N-LAPORI 2. Penyusunan Renaksi SP4N-LAPORI Tahun 2025-2029 3. Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan melalui SP4N-LAPORI Semester I Tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPORI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Tim Pengelolaan SP4N-LAPORI 2. Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan melalui SP4N-LAPORI Semester II Tahun 2026 3. Pemantauan Renaksi SP4N-LAPORI Tahun 2026
--	--	---	---	--	---	--	--	--

		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	2.00	Pelaksanaan Pengawasan dan Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Pengawasan 2025 2. Pemetaan Ketersediaan Dokumen Pendukung IACM 3. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Aol Hasil Evaluasi IACM 2. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3. Pemahaman Awal Kertas Kerja Audit TIK 4. Pelaksanaan Audit TIK 5. Penyusunan Draft Revisi Pedoman terkait Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja 2. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3. Monitoring Aol Hasil Evaluasi IACM 4. <i>Expose</i> Hasil Audit TIK 5. Penetapan Revisi Pedoman terkait Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit TIK 3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Telaah Eksternal 4. Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern 5. Pelaksanaan Evaluasi IACM oleh BPKP
2	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal Yang <i>Agile</i>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	82%	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKPT Tahun 2026 2. Dialog Kinerja Perencanaan Pengawasan 3. Penyampaian Matriks Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 2. Dialog Kinerja Pengukuran dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 3. Pengisian Matriks Ikhtisar Hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 2. Dialog Kinerja Pengukuran dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 2. Penyusunan PKPT Tahun 2027 3. Dialog Kinerja 4. Pengisian Matriks Ikhtisar Hasil

					4. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Semester II 2025	Pengawasan Semester I Tahun 2026	3. Penyampaian Matriks Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2026 4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Semester I 2026	Pengawasan Tahun 2026
		Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti	81%	Monitoring status rekomendasi Pengawasan Internal secara berkala	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2025	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester I Tahun 2026	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester I Tahun 2026	1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal 2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2026
3	Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai <i>Strategic Partner</i> dan <i>Trusted Advisor</i>	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	3 dari 4	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan	1. Sosialisasi Layanan Inspektorat 2. Penyusunan <i>Draft</i> Survei Kepuasan Layanan Pengawasan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan 2. Sosialisasi Layanan Inspektorat	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan 2. Sosialisasi Layanan Inspektorat	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan 2. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Pengawasan 3. Sosialisasi Layanan Inspektorat

		Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	90%	Penyelesaian Permintaan Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Layanan Inspektorat 2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 3. Penyusunan <i>Logbook</i> Layanan Konsultansi 4. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengisian <i>Logbook</i> Layanan Konsultansi 2. Sosialisasi Layanan Inspektorat 3. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengisian <i>Logbook</i> Layanan Konsultansi 2. Sosialisasi Layanan Inspektorat 3. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi 3. Sosialisasi Pelayanan Inspektorat
4	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	92%	Evaluasi AKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu LAKIP 2. Pengisian Capaian E-Monev TW I 3. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW I 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Simersi TW I 2. Evaluasi AKIP 3. Pengisian Matriks Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat 4. Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian 5. Reviu Renaksi RB 6. Pendampingan Reformasi Birokrasi terkait Prosedur Reviu Rencana Aksi RB 7. Pengisian Capaian E-Monev TW II 8. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW II 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Simersi TW II 2. Pengisian Matriks Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat 4. Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian 5. Pengisian Capaian E-Monev TW III 6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Simersi TW III dan TW IV 2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat 3. Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian 4. Pengisian Capaian E-Monev TW IV 5. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi TW IV

Jakarta, 30 Januari 2026
Inspektur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Sofjan', written over a vertical blue line that extends downwards.

Mirza Sofjanhadi Mashudi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.1 Tingkat Maturitas SPIP

Deskripsi IKU

Definisi

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui Penilaian Tingkat Maturitas SPIP, instansi pemerintah diharapkan dapat:

1. Mengetahui posisi dan kualitas penerapan SPIP yang telah dicapai;
2. Mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengendalian internal;
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan;
4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Penilaian Tingkat Maturitas SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Level Maturitas SPIP terdiri dari: **Level 0 = Belum ada; Level 1 = Level Rintisan; Level 2 = Berkembang; Level 3 = Terdefinisi; Level 4 = Terkelola & Terukur; Level 5 = Optimum.**

Formula

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut atau belum terdapat hasil evaluasi dari BPKP, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan kriteria penilaian BPKP.

Tujuan

Untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP / Laporan Penilaian Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(.....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(.....) Bulanan (..) Triwulanan (.....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3.55	3.548	3.58	3.489	3.58
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

KODE IKU: 1.2

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Deskripsi IKU

Definisi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unit pengawas eksternal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK adalah tingkat penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan internal, kualitas pengendalian internal, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Inspektorat melakukan pendampingan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan dari BPK yang dilakukan oleh auditi. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Status tindak lanjut sesuai atau belum ditentukan oleh BPK.

Formula

$$\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK} = \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang Sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan BPK}} \times 100\%$$

Dalam hal BPK belum terdapat Laporan Hasil Pemantauan di tahun tersebut, maka nilai yang digunakan adalah hasil perhitungan sendiri oleh Inspektorat yang didasarkan pada lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan terakhir.

Tujuan

Untuk mengetahui tingkat rekomendasi dari BPK yang telah ditindaklanjuti oleh auditi

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Terakhir
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	90%	92,22%	75%	73,35%*	76%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

*Nilai berdasarkan data terbaru berdasarkan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut terakhir yang diterima dari BPK.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 1.3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Deskripsi IKU

Definisi

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas atas 6 area yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini KemenPANRB. Terdapat 3 tahap evaluasi oleh TPN yaitu pra-evaluasi atau seleksi administrasi, *desk evaluation*, dan evaluasi lapangan.

Berikut kategori penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Nilai
>75%	3
>40% - 75%	2
>10% - 40%	1
0,1% - 10%	0,75
0%	0,5
Tidak Mengusulkan	0

Formula

Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang tertera dalam Surat Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian

Tujuan

Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Surat Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	(.....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	0,5	N/A	0,5
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 1.4

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.4 Opini BPK

Deskripsi IKU

Definisi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPK memberikan opini sebagai pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga.

Opini BPK merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Opini yang diberikan menjadi indikator kualitas tata kelola keuangan dan pengendalian intern, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern yang masih ditemukan.

Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

	2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3) Tidak Wajar (TW) 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)
	Formula Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2025
	Tujuan Memberikan pernyataan atau opini bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
Satuan Pengukuran	Predikat
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2025
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 1.5

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK. 1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Deskripsi IKU

Definisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). SPI berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan eksper/ahli dari berbagai kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai fasilitator KPK dalam pelaksanaan SPI membantu menyediakan data responden yang diperlukan oleh KPK.

Kategori Rentang Nilai SPI KPK

	Nilai	Kategori
	0 – 72,9	Rentan
	73 – 77,9	Waspada
	78 – 100	Terjaga

Formula

Hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Tujuan

Untuk mengukur tingkat integritas organisasi sebagai salah satu ukuran keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi.

Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	82	81,77	82
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 1.6

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK. 1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)

Deskripsi IKU

Definisi

LAPOR! adalah kanal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR! dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pemanfaatan aplikasi LAPOR! dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR! sebagai sarana menyampaikan pengaduan kepada K/L/D. Pengaduan yang disampaikan melalui LAPOR! diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain permintaan informasi, pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, pengaduan yang berkadar pengawasan, serta aspirasi. Kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan LAPOR! diukur dengan 6 kriteria yaitu:

- 1) Memiliki SK Pengelola,
- 2) Memiliki Rencana aksi,
- 3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan,
- 4) Kecepatan tindak lanjut < 3 hari,
- 5) Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif,
- 6) Rata-rata rating penilaian masyarakat >4.

Berikut kategori penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!):

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR!	Nilai
Memenuhi 6 indikator	5
Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator	4
Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator	3
Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator	2
Hanya memenuhi 1 dari 6 indikator	1

Formula

Nilai tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang tertera dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	3	N/A	4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 1.7

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK.1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengendalian Internal dan tata kelola pemerintahan merupakan tingkat kematangan dan efektivitas dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kinerja serta keuangan.

Akuntabel menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya. Akuntabilitas tercermin melalui pengelolaan sumber daya yang transparan, pelaporan yang andal dan tepat waktu, serta kesiapan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berintegritas mengandung arti bahwa seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, etika, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Integritas tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penolakan terhadap praktik penyimpangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel digambarkan melalui capaian IKU 1.1 Tingkat Maturitas SPIP, 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, 1.4 Opini BPK, dan 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) kemudian Berintegritas digambarkan melalui capaian IKU 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI), dan 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPORI!).

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.

Dengan terwujudnya pengendalian internal yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berintegritas, instansi pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal sekaligus memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Deskripsi IKU

Definisi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kapabilitas APIP (IACM) adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan. Peningkatan Kapabilitas APIP mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan Model Kapabilitas APIP. Model Kapabilitas APIP terdiri atas: a. level Kapabilitas APIP; b. elemen Kapabilitas APIP; dan c. topik Kapabilitas APIP.

Elemen Kapabilitas APIP terdiri dari: Kualitas Peran dan Layanan, Profesionalisme Penugasan, Manajemen Pengawasan APIP, Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan, Budaya dan Hubungan Organisasi. Masing-masing elemen terdiri dari beberapa topik.

Elemen Kualitas Peran dan Layanan terdiri dari 5 (lima) topik: Pengawasan Ketaatan, Pengawasan Kinerja, Assurance GRC, Assurance Lainnya, dan Kegiatan Konsultasi; elemen Profesionalisme terdiri dari 6 (enam) topik: Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Pengawasan, Pemantauan Tindak Lanjut, Pengendalian Kualitas Pengawasan; elemen Manajemen Pengawasan terdiri dari 2 (dua) topik: Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan kepada Manajemen/Stakeholder; elemen Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari 5 (lima) topik: Perencanaan SDM, Pengembangan Kompetensi SDM Profesional, Manajemen Kinerja, Mekanisme Pendanaan, Dukungan terhadap Teknologi dan Sistem Informasi; elemen Budaya dan Hubungan Organisasi terdiri dari 5 (lima) topik: Pembangunan Budaya Integritas, Pengelolaan Komunikasi Internal APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen K/L/D, Koordinasi Pengawasan dengan Pemeriksa dan/atau APIP lainnya, Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya Pengawasan.

Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = Rintisan, Level 2 = Terstruktur, Level 3 = Memadai, Level 4 = Terintegrasi, Level 5 = Optimal.

Formula

Nilai Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut atau belum terdapat hasil evaluasi dari BPKP, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan kriteria penilaian BPKP.

Tujuan

Untuk memperoleh keyakinan dan mengukur tingkat kapabilitas APIP yang sebenarnya dan mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Pengukuran

Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat

Pejabat Penanggung Jawab Data

Inspektur

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (IACM) oleh BPKP/ Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (IACM) oleh Inspektorat

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(.....) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(.....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(.....) Bulanan (..) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3,10	3,25	3,27	3,28*	2,00
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

*Nilai berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) Tahun 2025 oleh Inspektorat

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80%	83%	82%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (..) Triwulanan (X) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80%	83,33%	81%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	40%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	81%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 3.1

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan

SK.3 Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor*

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perubahan peran dari pengawasan yang bersifat detektif dan berfokus pada kepatuhan menjadi *trusted advisor* yang memberikan keyakinan yang memadai serta nasihat profesional yang independen, objektif, dan bernilai tambah, sekaligus *strategic partner* yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan strategis organisasi.

Transformasi APIP sebagai *strategic partner* diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberian keyakinan yang memadai (*assurance*) digambarkan melalui IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat. Transformasi APIP sebagai *trusted advisor* diwujudkan melalui pemberian layanan konsultasi yang terencana, responsif, dan bernilai tambah dan diwujudkan melalui IKU 3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan APIP tidak hanya berperan dalam mendeteksi penyimpangan, tetapi juga secara aktif memberikan rekomendasi perbaikan, pendampingan, dan solusi kepada manajemen untuk memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal mendukung pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat, yang terdiri dari layanan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Konsultasi dengan melakukan survei kepada unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu:

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan.
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan.
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman.
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan.

Survei kepuasan layanan pengawasan Inspektorat disusun sebagai instrumen untuk memperoleh umpan balik yang objektif dan terukur dari unit kerja atas pelaksanaan layanan pengawasan yang telah diberikan dan hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan, serta memperkuat peran APIP selaku mitra strategis manajemen. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Sangat Puas
2. Puas
3. Tidak Puas
4. Sangat Tidak Puas

Formula

Adapun formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.5

Tujuan

Untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepuasan pengguna layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat, Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Pengawasan
Tingkat Kendali IKU	(....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(....) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non-Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	3 dari 4	3,65	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Inspektorat

KODE IKU: 3.2

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan SK.3 Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor*

Deskripsi Sasaran Kegiatan Transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perubahan peran dari pengawasan yang bersifat detektif dan berfokus pada kepatuhan menjadi *trusted advisor* yang memberikan keyakinan yang memadai serta nasihat profesional yang independen, objektif, dan bernilai tambah, sekaligus *strategic partner* yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan strategis organisasi.

Transformasi APIP sebagai *strategic partner* diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberian keyakinan yang memadai (*assurance*) digambarkan melalui IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat. Transformasi APIP sebagai *trusted advisor* diwujudkan melalui pemberian layanan konsultansi yang terencana, responsif, dan bernilai tambah dan diwujudkan melalui IKU 3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan APIP tidak hanya berperan dalam mendeteksi penyimpangan, tetapi juga secara aktif memberikan rekomendasi perbaikan, pendampingan, dan solusi kepada manajemen untuk memastikan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal mendukung pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Deskripsi IKU

Definisi
Peran konsultansi APIP adalah salah satu fungsi utama dalam kerangka pengawasan intern pemerintah selain fungsi pemberian keyakinan yang memadai (*assurance*), yang meliputi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Melalui fungsi konsultansi, APIP memberikan masukan, pendampingan, dan solusi kepada unit kerja yang bertujuan untuk membantu unit kerja mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), dan memperkuat peran APIP sebagai *trusted advisor* dan *strategic partner*.

Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi adalah ukuran keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan fungsi konsultansi APIP seperti pemberian saran, pendampingan, bimbingan teknis dan bentuk konsultansi lainnya, baik yang direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan maupun yang dilaksanakan sebagai respons atas permintaan unit kerja. Efektivitas dalam IKU ini mencerminkan tingkat komitmen dan responsivitas APIP dalam menjalankan fungsi konsultansi secara optimal yang bernilai tambah guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Formulasi

$$\% \text{Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi} = \left(\frac{\text{Rencana Kegiatan Konsultansi yang terlaksana}}{\text{Kegiatan Konsultansi yang direncanakan}} + \frac{\text{Permintaan Konsultansi yang diselesaikan}}{\text{Permintaan Konsultansi yang diterima}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Rencana kegiatan konsultansi yang terlaksana adalah kegiatan konsultansi yang direalisasikan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat
- Kegiatan konsultansi yang direncanakan adalah kegiatan konsultansi yang telah ditetapkan dalam program pengawasan tahunan Inspektorat
- Permintaan konsultansi yang diselesaikan adalah kegiatan konsultansi yang telah diberikan kepada penerima layanan dan telah selesai secara formal melalui berita acara atau bentuk lainnya yang disepakati
- Permintaan konsultansi yang masuk adalah seluruh permintaan konsultansi yang diterima Inspektorat dalam periode tahun anggaran

Tujuan
Untuk mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan konsultansi yang direncanakan dan penyelesaian permintaan konsultansi oleh unit kerja

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Nota Dinas Hasil Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi dan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi
Tingkat Kendali IKU	<input checked="" type="checkbox"/> High (....) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(.....) Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(.....) Cascading Peta (.....) Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	(.....) Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan (....) Semesteran (.....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80%	100%	90%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	90%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	90%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	90%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

KODE IKU: 4.1

Sasaran Kegiatan

SK.4 Terwujudnya Tata Kelola APIP yang Baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang tercermin melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional dan terukur di lingkungan Inspektorat. Tata kelola APIP didukung oleh penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI), perencanaan pengawasan berbasis risiko, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu, serta sistem pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang andal. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas APIP, baik dari aspek organisasi, sistem kerja, maupun sumber daya pendukung, sehingga APIP dapat menjalankan perannya sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan fasilitator, memberikan nilai tambah bagi organisasi, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara independen dan objektif.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Inspektorat. Implementasi kegiatan RB General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2026, Inspektorat melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Indeks Reformasi Birokrasi yang diampu oleh Inspektorat yang meliputi*:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Tingkat Digitalisasi Arsip
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
5. Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Capaian Akuntabilitas Kinerja
6. Tingkat Implementasi Rencana Aksi
7. Indeks Perencanaan Pembangunan
8. Indeks Pelayanan Publik

**Indikator tersebut dapat berubah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tahun 2026*

Formula

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan rencana aksi RB General di Inspektorat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Rencana Aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Rencana Aksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Inspektorat

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Rekapitulasi/Tabulasi Data Pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat kementerian
Tingkat Kendali IKU	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	85%	92,73%	92%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	23%
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	46%
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	69%
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	92%